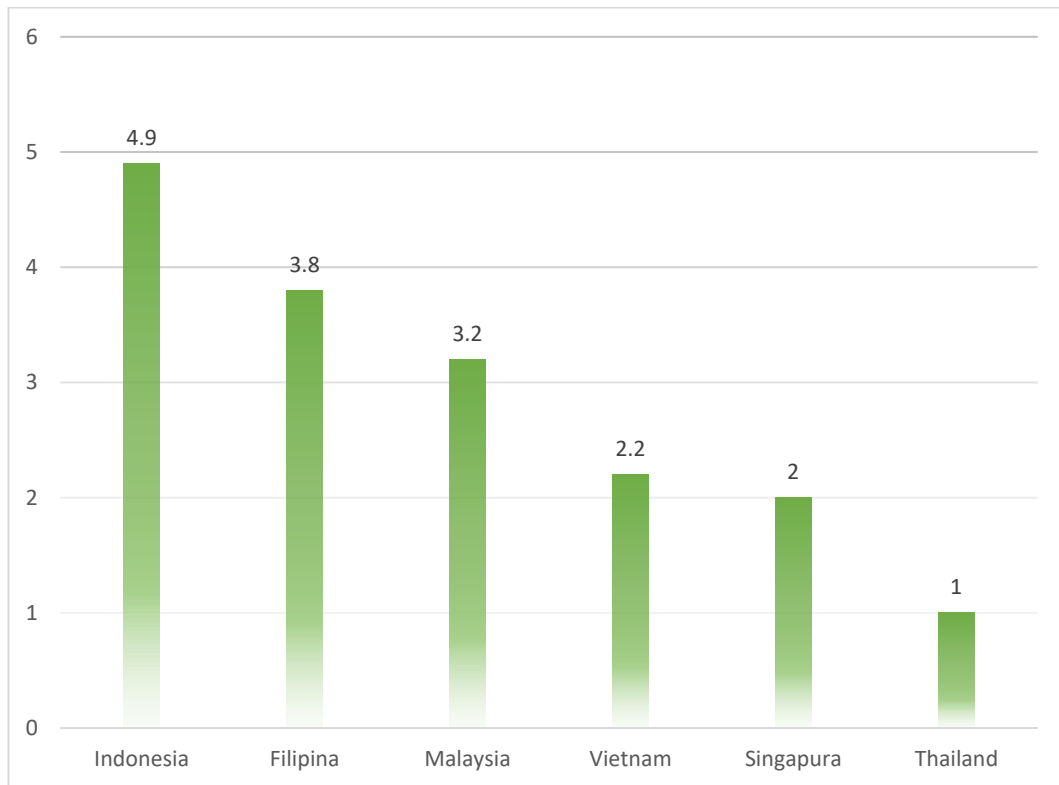


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian suatu negara terutama negara berkembang seperti Negara Indonesia, semakin banyak jumlah pengangguran akibat dari permasalahan ekonomi yang terjadi, secara tidak langsung akan berdampak pada perekonomian secara menyeluruh. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, kesempatan kerja masih menjadi masalah utama (Hartono et al., 2018). Tingkat pengangguran merupakan masalah serius yang harus ditanggapi dengan secepat mungkin. Jumlah tingkat penyerapan tenaga kerja diharuskan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, dikarenakan dari waktu ke waktu jumlah penduduk atau jumlah angkatan kerja di Indonesia ini pun akan terus bertambah banyak (Basmar et al., 2021).



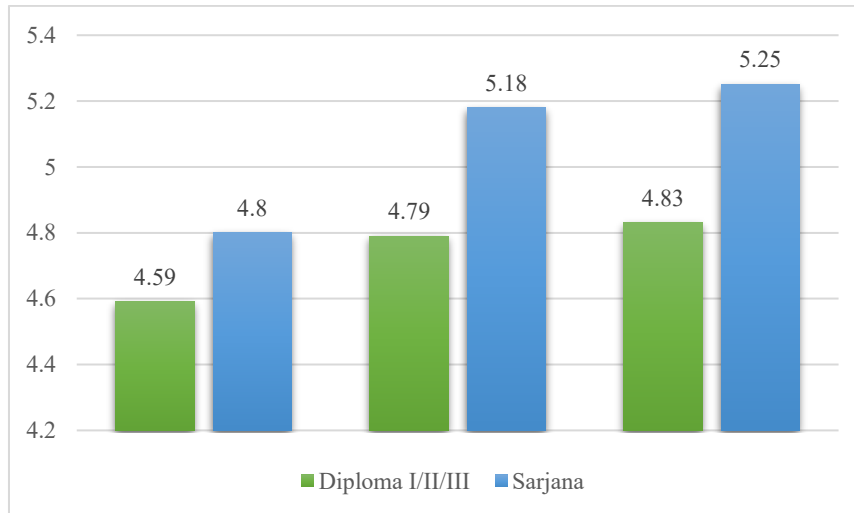
Gambar 1. 1
Tingkat Pengangguran di Negara ASEAN pada Tahun 2024

Sumber : International Monetary Fund (IMF) (2025)

Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan dalam laporan *World Economic Outlook* tahun 2025 bahwa negara Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara enam negara ASEAN pada tahun 2024. Negara ASEAN lainnya yaitu Kamboja, Myanmar, Laos dan Brunei Darussalam tidak dimasukkan oleh IMF karena data yang terbatas (*International Monetary Fund*, 2025). Berdasarkan data tersebut tingkat pengangguran di Indonesia tercatat sebesar 4,9% dengan total penduduk Indonesia sebanyak 279,96 juta orang. Sementara itu, Vietnam yang memiliki total penduduk terbanyak kedua setelah Indonesia sebanyak 101.598.527 orang, tingkat pengangguran hanya sebesar 2,2%. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah pengangguran naik 1,11% dari sebelumnya yaitu mencapai 7,20 juta orang. Peningkatan ini dipicu oleh laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat, dari kemampuan pasar menyerap tenaga kerja (IDNFinancials, 2025). Secara umum, penyerapan tenaga kerja di Indonesia ini belum memberikan hasil yang maksimal (Pranadji & Hardono, 2015).

Berdasarkan laporan publikasi dari Dana Moneter Internasional (IMF) dalam *World Economic Outlook* pada April tahun 2025, tingkat pengangguran di Indonesia diprediksi akan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun ke depan, dampak dari ketidakpastian ekonomi dan politik di dunia. IMF memprediksi tingkat pengangguran di Indonesia akan mencapai 5% pada tahun 2025 dan 5,1% pada tahun 2026. Perekonomian di dunia sedang berada dalam masa ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dan politik (*International Monetary Fund*, 2025).

Stabilnya perekonomian merupakan gambaran umum kemampuan suatu negara dalam mengatasi berbagai macam permasalahan dalam ekonominya. Ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dengan tingkat pengangguran rendah merupakan salah satu tujuan utama kebijakan ekonomi makro di semua negara, termasuk Negara Indonesia (Simionescu et al., 2020).



Gambar 1. 2

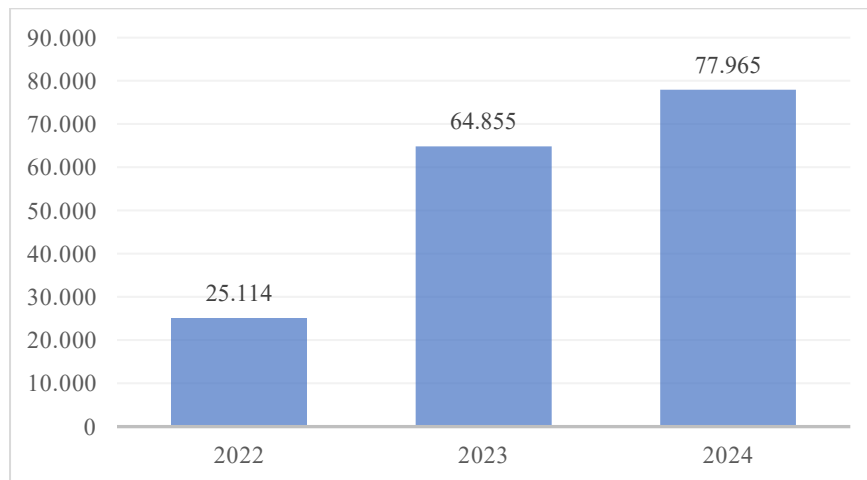
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Indonesia Dalam 3 Tahun Terakhir

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) (2024)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dilihat dari tingkat pendidikannya yaitu tingkat Diploma I/II/III dan Sarjana dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, tahun 2022-2024 terus mengalami peningkatan. TPT Diploma I/II/III dan Sarjana pada tahun 2024 yaitu sebesar 4,83% meningkat 0,24% dan sebesar 5,25% naik 0,45% dari tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2024). Salah satu hambatan pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia berkualitas ini salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara sangat ditentukan salah satunya oleh tenaga kerja yang berkualitas dalam menunjang jalannya perekonomian (Fatimah & Slamet, 2023).

Pengangguran adalah salah satu ukuran utama kesehatan ekonomi dan selama beberapa dekade terakhir ini, tingkat pengangguran telah menjadi subjek paling banyak diteliti (Magazzino et al., 2024). Seiring berjalannya waktu, topik tentang pengangguran ini semakin penting untuk dibahas dalam penelitian (Astari et al., 2019), terutama dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya. Puncak bonus demografi Negara Indonesia menurut BPS terjadi pada tahun 2020-2030 (Badan Pusat Statistik, 2022). Bonus demografi adalah kondisi di mana suatu negara memiliki proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang

lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia) (detik.com, 2024).



Gambar 1.3
Jumlah Tenaga Kerja yang Terkena PHK

Sumber : Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) (2025)

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada tahun 2024 total jumlah tenaga kerja yang ter-PHK yaitu sebanyak 77.965 orang, jumlah tersebut meningkat 20,21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 64.855 orang (Kementerian Ketenagakerjaan, 2025). Masalah penyerapan tenaga kerja merupakan masalah signifikan dalam negara berkembang seperti Indonesia (Yasin & Kartini, 2023). Kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini menurut Wakil Menteri Ketenagakerjaan, sedang tidak dalam keadaan baik. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) tahun 2024 merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Terdapat 3 sektor besar yang paling banyak melakukan PHK, yaitu industri pengolahan (termasuk industri tekstil) sebanyak lebih dari 28.000 orang, sektor jasa lebih dari 15.000 orang, dan sektor perdagangan bebas lebih dari 8.000 orang (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024). Masalah pengangguran adalah salah satu dari beberapa masalah penting yang dihadapi dalam masyarakat modern (Semra, 2020).

Perekonomian suatu negara sangat bergantung pada kontribusi berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, manufaktur, perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. Kemajuan sektor-sektor ekonomi tersebut memberikan dampak nyata yang besar terhadap aktivitas ekonomi suatu negara, termasuk tersedianya lapangan kerja

(Pane et al., 2024). Jika terjadi penurunan aktivitas dalam sektor-sektor ekonomi tersebut, maka akan menyebabkan masalah ekonomi bagi Indonesia seperti terjadinya peningkatan pengangguran dan kemiskinan (Balqis et al., 2024).

Terdapat beberapa variabel lain yang dapat digunakan juga di dalam penelitian ini, seperti tingkat upah, ekspor dan impor. Namun, upah dan ekspor-impor tidak digunakan dalam penelitian dikarenakan beberapa alasan yaitu keterbatasan data (Badan Pusat Statistik, 2024), fokus penelitian pada variabel yang dapat menjadi penyebab meningkatnya tenaga kerja yang bekerja sedangkan upah menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja dengan bertambahnya biaya (Sabihi et al., 2021), ekspor-impor tidak digunakan lagi karena sudah terdapat di dalam variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Hartono et al., 2018).

Peneliti menggunakan variabel-variabel yang memiliki fenomena tidak biasa saat ini seperti, inflasi Indonesia yang rendah (Badan Pusat Statistik, 2024), kondisi ekonomi lesu yang akan menyebabkan terjadinya resesi ekonomi (*International Monetary Fund*, 2025), aliran dana investasi asing langsung yang tinggi di Indonesia (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2024), banyaknya kasus korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024), kualitas masyarakat yang rendah (Badan Pusat Statistik, 2024) dan juga anggaran pemerintah yang sangat tinggi (Kementerian Keuangan, 2024).

Pernyataan Ibnu Khaldun terkait permasalahan ekonomi (pengangguran) yaitu bahwa kekayaan suatu negara ditentukan oleh tingkat produksi negara dan neraca pembayaran yang positif. Faktor-faktor produksi adalah penggerak utama produktivitas suatu negara yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan negara. Al-Tariqi dalam penelitian Muttaqin (2018) mendukung pernyataan Ibnu Khaldun tersebut yaitu bahwa perkembangan ekonomi yang terjadi ini seiring dengan meningkatnya juga faktor-faktor produksi di dalamnya. Ketika, permintaan terhadap suatu produk meningkat, hal itu akan mendorong pengembangan dalam memproduksi produk (Mannan, 2016).

Hukum Okun (1962) juga menyatakan hubungan yang sama dengan Ibnu Khaldun yaitu, jika tingkat pengangguran turun menjadi 1%, maka output ekonomi akan meningkat sebesar 3% (Murat Sadiku et al., 2022). Teori tersebut

membuktikan bahwa peningkatan yang terjadi pada PDB riil atau output ekonomi ini seiring dengan terjadinya peningkatan juga pada penyerapan tenaga kerja di suatu negara tersebut (A. Moridian et al., 2024). Hal itu sesuai juga dengan hasil penelitian Panite et al., (2022) tentang hukum Okun yang menyebutkan bahwa perubahan ekonomi dengan output mengalami peningkatan sebesar 1%, maka tingkat pengangguran akan turun 0,5%.

Laju produk domestik bruto (PDB) Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2023 yang mencapai 5,1%, pada tahun 2024 hanya sebesar 5%. Berdasarkan laporan dari *International Monetary Fund* dalam publikasinya yang berjudul “*World Economic Outlook: A Critical Juncture amid Policy Shifts*” diproyeksikan laju PDB riil Indonesia mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 4,7% di tahun 2025 dan 2026 (*International Monetary Fund*, 2025) PDB adalah indikator penting yang dapat menggambarkan kinerja ekonomi suatu negara. Semakin baik ekonomi di suatu negara, maka akan semakin tinggi pula output atau kegiatan produksi yang terjadi pada suatu negara (Buswari et al., 2023). Ketika ekonomi tumbuh dengan baik, perusahaan cenderung memperluas operasi mereka, menciptakan lebih banyak peluang kerja untuk penduduk lokal (Djadjuli 2018).

Ekonomi yang kuat dan tumbuh dengan baik dapat menyebabkan peningkatan tingkat penyerapan tenaga kerja (Ngatikoh, 2020). Dalam penelitian Febriyanti et al., (2024) menunjukkan bahwa PDB ini berdampak positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menegaskan keberadaan Hukum Okun, yang menjelaskan hubungan negatif antara PDB dan pengangguran atau hubungan positif antara PDB dan penyerapan tenaga kerja. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya (Silvia, A & Susilowati, D 2023; Hafiz, et al., 2021; Widjajanto et al., 2020; Astari et al., 2019; Hartono et al., 2018). Adapun temuan berbeda (Yoga dan Nur, 2023), PDRB tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian.

Total nilai FDI Indonesia pada tahun 2024 sebesar US\$54,3 miliar, jika dibandingkan dengan nilai FDI Vietnam hanya sebesar US\$25,35 miliar (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2024). Namun, kontribusi FDI yang diberikan terhadap perekonomian Vietnam lebih baik dibandingkan Indonesia, dengan

industri pengolahan dan manufaktur serta ekspor yang menjadi sektor terkena dampak FDI, sektor-sektor tersebut berhasil memberikan lapangan kerja bagi banyak masyarakat Vietnam dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (CNN Indonesia, 2025). Pertumbuhan ekonomi di Vietnam berhasil mencapai 7,1%, lebih besar dibandingkan Indonesia yang hanya mencapai 5% pada tahun 2024 tersebut (*International Monetary Fund*, 2025). Kemajuan ekonomi yang didukung oleh investasi karena akan mendorong kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Appiah et al., 2023). Investasi langsung memiliki peran dalam mendorong kegiatan manufaktur dan infrastruktur (Andini, 2022). Investasi asing langsung (FDI) di Indonesia diharapkan mampu berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi saat ini, termasuk diharapkan mampu menjadi solusi dalam menciptakan lapangan kerja (Dewi & Syaifullah, 2022).

Dalam penelitian Meilasari (2020) investasi asing langsung berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau Jawa. Alalawneh & Nessa (2020) juga menyatakan bahwa FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di enam negara MENA dalam jangka panjang, tetapi berpengaruh tidak signifikan dalam jangka pendek. Hasil temuan tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya (Wibowo, 2023; Dewi & Syaifullah, 2022; Choudhry et al., 2020; Kartikasari, 2017; Mahmoodi & Mahmoodi, 2016). Penelitian lain mengungkapkan hasil berbeda yaitu FDI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Suwito, 2024; Sabihi et al. 2021; Ali et al., 2020; Ganic, 2019). Adapun juga hasil lainnya yang menyatakan bahwa FDI ini tidak berpengaruh (Taqiyyuddin, 2023; Maghfiroh et al., 2020).

Berdasarkan informasi APBN tahun 2025, alokasi pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan sebesar 9,5% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp2.701,4 triliun. Anggaran tersebut setiap tahunnya terus mengalami peningkatan (Kementerian Keuangan, 2025). Pengeluaran pemerintah dalam mendukung kepentingan publik adalah hal yang sangat penting, semakin banyak yang dibelanjakan maka semakin baik pula akibatnya bagi perekonomian (Purnamasari, 2018). Dalam upaya mendukung tercapainya perekonomian yang

baik, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang dapat menciptakan dan mendorong produktivitas para pelaku ekonomi agar bisa mendorong terciptanya lapangan kerja (Indraswari & Yuhan, 2019). Pengeluaran pemerintah dalam pelaksanaan proyek-proyek nasional terdiri dari sektor-sektor pembangunan yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja (Chodariyanti, 2019).

Penelitian (Wu, 2020), pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang kuat dengan penyerapan tenaga kerja, pengeluaran pemerintah akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Dalam penelitian Chien & Chen (2020) mengkaji hubungan antara pengeluaran pemerintah dan tingkat penyerapan tenaga kerja di negara-negara anggota OECD. Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan tersedianya lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan transportasi. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian lainnya (Nguyen & Tran, 2021; Ahmed & Hassan, 2021; Farooq & Bilal, 2020). Pengeluaran pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat berperan penting dalam menciptakan peluang kerja serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran (Farooq & Bilal, 2020). Adapun temuan berbeda dalam penelitian lainnya yang menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Khan & Ali, 2022; Idris & El-Khater, 2021; Al-Jabari & Younis, 2020).

Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia di ASEAN hanya menempati peringkat kelima pada tahun 2022, kalah dari negara Brunei Darussalam diperingkat kedua dan Malaysia di peringkat ketiga (Databooks.id, 2023). Kemudian, Tingkat lulusan Pendidikan masyarakat Indonesia pun cenderung didominasi oleh lulusan SMA/SMK sebesar 30,85%, dilanjutkan dengan SD sebesar 24,72% dan SMP 22,79%, sisanya adalah lulusan universitas sebesar 10,2% (Badan Pusat Statistik, 2024). Produktivitas tenaga kerja atau penduduk seiring dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi (Sukmaraga, 2021). Semakin tingginya kualitas hidup manusia, akan mempengaruhi tenaga kerja dalam mencari pekerjaan (Yoga dan Nur, 2023).

Dalam penelitian Febriyanti et al., (2024) menunjukkan indeks pembangunan manusia ini berdampak positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di usia muda dalam jangka panjang. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian lainnya, memiliki hasil yang sama (Parisi, 2021; Hafiz, et al. 2021; Zulhanafi et al., 2017). Adapun temuan berbeda yang menyatakan indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja (Yoga & Nur, 2023; Rozaini, 2023; Bayrak & Tatli, 2018; Folawewo & Adeboje, 2017).

Tingkat inflasi di Indonesia saat ini mengalami penurunan, inflasi pada tahun 2024 hanya sebesar 1,57%, turun dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 2,61%. Bahkan, awal tahun 2025 ini turun hingga -0,09% di bulan Februari (Badan Pusat Statistik (BPS), 2025). Bank Indonesia menyebutkan inflasi normal di kisaran 1-3 persen, tergantung tingkat kemajuan suatu perekonomian. Inflasi di negara berkembang justru normalnya 3-5 persen, sementara di negara maju berkisar 2-3 persen (Bank Indonesia, 2022). Inflasi yang tidak terkendali termasuk terlalu rendah, menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, akibatnya menurunkan permintaan agregat dan memperlambat penyerapan tenaga kerja (Farooq & Bilal, 2022). Sektor informal atau formal ekonomi akan merespons penurunan permintaan dengan mengurangi jumlah produksi dan bahkan mengurangi tenaga kerja untuk menyesuaikan biaya operasional (Rahman & Khan, 2022). Inflasi dalam ekonomi penting untuk menstimulus perekonomian sehingga ekonomi dapat berkembang, berdampak pada permintaan tenaga kerja (Ball, 2018).

Penelitian sebelumnya, yaitu Ibrahim & Musa (2022) menyebutkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Inflasi yang terkendali menciptakan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja karena masyarakat lebih mampu membeli barang dan jasa, yang akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Temuan tersebut didukung oleh penelitian lainnya (Blanchflower & Oswald, 2022; Blanchard & Ball, 2021; Anwar & Khalid, 2021; Abidin et., 2020). Temuan berbeda dalam penelitian Ozil (2020) inflasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Inflasi yang terlalu tinggi akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, akibatnya menurunkan permintaan barang yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Hasil tersebut

didukung oleh penelitian terdahulu (Abdulazeez, 2024; Farooq & Bilal, 2022; Hasan & Ahmed, 2020).

Indonesia menempati urutan kelima menjadi negara yang tidak korupsi di ASEAN dengan skor CPI 37/100. Peringkat tersebut kalah dengan Vietnam dan Malaysia sebagai negara yang lebih bersih dari korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025). Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini menghalangi kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, yang seharusnya memfokuskan pada pengembangan sektor padat karya yaitu penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan merata (Pham, 2024). Tingkat korupsi mencerminkan efektif atau tidaknya perekonomian di suatu negara (Muttaqin 2018).

Penelitian Ahmed & Abbas (2023) dan Gupta et al. (2022) menggunakan variabel korupsi sebagai moderasi dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasilnya korupsi ini memperlemah hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian lain yaitu Chen et al. (2025), Wang et al. (2024) dan Ahmed & Hussain (2022) korupsi bertindak sebagai moderator negatif dalam hubungannya antara FDI dan penyerapan tenaga kerja. Ketidakpastian ekonomi karena korupsi menghambat investasi yang menciptakan lapangan kerja. Korupsi mengurangi efektivitas pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan konsumsi masyarakat (Wilantari et al., 2024; Delavallade, 2023). Dalam Rachmawati (2022) dan Isa et al. (2021) korupsi memoderasi indeks pembangunan manusia, di mana proses pembangunan manusia yang berkualitas terhambat akibat adanya korupsi. Korupsi pun menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas manusia tersebut. Penelitian Chen et al. (2025), Gupta et al. (2022) dan Bylund & McCaffrey (2017) menyebutkan bahwa korupsi memoderasi hubungan inflasi dengan penyerapan tenaga kerja. Tingkat inflasi menjadi semakin tinggi akibat biaya tambahan dengan adanya korupsi.

Islamic Human Development Index (I-HDI) menjadi sangat penting dalam penelitian ini karena tidak hanya mengukur pembangunan manusia dari sisi ekonomi dan sosial seperti HDI konvensional (pendidikan, kesehatan, dan pendapatan), tetapi juga memasukkan dimensi spiritualitas dan moralitas Islam, seperti religiositas, keadilan sosial, dan etika (Huda, 2020). Indonesia sebagai

mayoritas berpenduduk Muslim sehingga relevan. I-HDI menjadi indikator yang lebih kontekstual dan representatif dibandingkan HDI biasa (Zulhanafi et al., 2020). I-HDI mencakup aspek-aspek seperti keadilan distribusi kekayaan, perlindungan hak-hak dasar, dan pengentasan kemiskinan, yang merupakan inti dari maqashid al-shariah (tujuan-tujuan syariat).

Banyak penelitian menggunakan variabel yang sama di dalam penelitian sebelumnya, hasil temuan tidak konsisten. Kontribusi penelitian ini pada studi sebelumnya yaitu pertama, penulis mengintegrasikan sejumlah variabel dari studi sebelumnya. Variabel independen yaitu *Islamic Human Development* (I-HDI) dan variabel moderasi yaitu korupsi digunakan, yang membedakannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti menggunakan pendekatan perspektif ekonomi Islam dalam menghadapi permasalahan penyerapan tingkat tenaga kerja ini. Korupsi juga digunakan di dalam penelitian sebagai variabel moderasi agar dapat berkontribusi untuk mengembangkan model baru pada variabel Independen dan dalam hal ini dapat memperkuat dan juga memperlemah variabel dependen sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kedua, penelitian ini memuat sampel yang dimulai dari tahun 2021-2024 (periode paling terbaru), dengan memuat latar belakang atau masalah yang berbeda maka menambah literatur pengembangan dari penelitian sebelumnya. Ketiga, penelitian ini menggunakan objek penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya yakni provinsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah dijelaskan dan juga inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya, maka Penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia: Analisis Variabel Makroekonomi dan *Islamic Human Development Index* (I-HDI) dengan Korupsi Sebagai Variabel Moderator (Studi Kasus pada 30 Provinsi Periode 2021-2024)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas yang telah disajikan, masalah penelitian ini diidentifikasi seperti yang tercantum di bawah ini :

1. Negara Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada tahun 2024 (*International Monetary Fund*, 2025)
2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan di tahun 2024 dan diproyeksikan oleh *International Monetary Fund* (IMF) hanya tumbuh 4,7% pada tahun 2025 & 2026 (*International Monetary Fund*, 2025).
3. Nilai investasi asing langsung Indonesia yang sangat tinggi dibandingkan Vietnam belum mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2025)
4. Anggaran pengeluaran pemerintah yang besar dan meningkat setiap tahunnya belum mampu mendorong penyerapan tenaga kerja lebih banyak (Kementerian Keuangan, 2025)
5. Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN, Indonesia hanya menempati peringkat kelima pada tahun 2022, kalah dari negara Brunei Darussalam di peringkat kedua dan Malaysia di peringkat tiga (Databooks.id, 2023)
6. Tingkat inflasi di Indonesia hanya sebesar 1,57% pada tahun 2024, turun dibandingkan tahun 2023 dan awal tahun 2025 turun hingga -0,09% di bulan Februari (Badan Pusat Statistik (BPS), 2025)
7. Indonesia menempati urutan kelima menjadi negara tidak korupsi di ASEAN dengan skor CPI 37/100 dan peringkat tersebut kalah dari Vietnam dan Malaysia (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah sebelumnya, terbentuklah pertanyaan penelitian sebagaimana yang tercantum dibawah ini :

1. Bagaimana tingkat penyerapan tenaga kerja, PDRB, FDI, pengeluaran pemerintah, I-HDI, inflasi dan korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?

4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh I-HDI (*Islamic Human Development Indeks*) terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
7. Bagaimana korupsi memoderasi pengaruh PDRB terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
8. Bagaimana korupsi memoderasi pengaruh FDI terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
9. Bagaimana korupsi memoderasi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
10. Bagaimana korupsi memoderasi pengaruh I-HDI terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
11. Bagaimana korupsi memoderasi pengaruh inflasi terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2021-2024. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), investasi asing langsung (FDI), pengeluaran pemerintah, *Islamic Human Development Index* (I-HDI) dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja yang dimoderasi juga oleh korupsi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi hal-hal yang telah tertera dibawah ini :

1. Manfaat Teoritis

Dari manfaat teoritis, studi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan bidang ekonomi Islam. Dengan menjelajahi aspek-aspek yang relevan serta memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu menjadikan teori dan konsep ekonomi Islam. Penelitian sebelumnya melalui sudut pandang ilmu ekonomi konvensional sedangkan penelitian ini memasukkan teori dan konsep ekonomi Islam yang diharapkan bisa sebagai pisau bedah dalam kajian penelitian

saat ini. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman baru yang lebih komprehensif terkait faktor apa saja yang bisa menjadi solusi dalam meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja.

2. Manfaat Praktis

Dari sudut pandang praktis, penelitian ini menjadi dasar bagi masyarakat sebagai pelaksana ekonomi dan pemangku kebijakan, baik itu pihak swasta ataupun pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi. Selanjutnya diharapkan juga dapat meningkatkan pemahaman yang lebih menyeluruh bagi pembaca tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.